KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA **KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT** **DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM**	Nomor SOP	W.16.OT.01.02-1494
	Tanggal Pembuatan	20 Maret 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 Maret 2025
	Disahkan oleh	Kepala Kantor Wilayah, Ditandatangani secara elektronik oleh : JONNY PESTA SIMAMORA NIP. 197312251993031001
	Nama SOP	**INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM DI WILAYAH**

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia	1. Memahami tugas dan fungsi organisasi; 2. Memahami Peratuan Menteri Hukum; 3. Memiliki kemampuan melakukan inventarisasi permasalahan hukum melalui Aplikasi SIPKUMHAM dan sumber lainnya.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
1. SOP Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1. Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi Permasalahan Hukum dan Pelayanan Publik di Wilayah 2. Perangkat Teknologi Digital 3. Akses Internet 4. Printer dan Scanner
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka terjadi kurangnya keterbukaan informasi hukum dan pelayanan publik	Perangkat Komputer, Aplikasi Penomoran, Aplikasi Sisumaker dan Aplikasi Sipkumham

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

INVENTARISASI PERMASALAHAN HUKUM DI WILAYAH

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		KAKANWIL	KADIV P3H	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Pembentukan Tim kerja inventarisasi permasalahan hukum & pelayanan publik dengan pemanfaatan SIPKUMHAM di Wilayah				Dasar Hukum Pembentukan SK	1 jam	SK Tim Kerja Analisis Kebijakan dan Pemanfaatan Sipkumham
2	Melakukan inventarisasi data permasalahan hukum yang telah dikumpulkan dari Sipkumham atau permasalahan actual dari sumber lain seperti media *online*, media cetak, laporan masyarakat atau hasil koordinasi dengan instansi lain yang terjadi di Wilayah		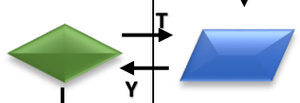		Data pada Aplikasi SIPKUMHAM dan sumber lainnya	7 hari	Tersedianya Daftar Inventarisasi data permasalahan hukum dan pelayanan publik di Wilayah
3	Melakukan verifikasi dan validasi terhadap permasalahan hukum dan pelayanan publik yang menjadi lingkup kewenangan Kemenkum		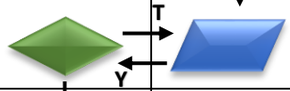		Nota Dinas untuk permintaan data permasalahan hukum dan pelayanan publik	3 hari	Data permasalahan dan verifikasi lapangan
4	Menginput data secara manual ke dalam Aplikasi SIPKUMHAM			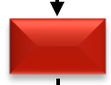	Hasil dari verifikasi lapangan dan sumber lainnya	2 jam	Terdata di Aplikasi SIPKUMHAM
5	Melakukan inventarisasi dalam dokumen inventarisasi permasalahan hukum dan pelayanan publik melalui Aplikasi SIPKUMHAM atau sumber lainnya				Permaslahan yang belum terakomodasi dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemenkum	7 hari	Dasar rekomendasi bagi evaluasi dan kebijakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi